

**HUKUM UPAH ANAK KELUARGA MUSLIM OLEH PENGASUH NON MUSLIM
DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI**

(Studi Komparatif Terhadap Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Maliki)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Maulana Yusuf

1621030040

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H/ 2021 M

**HUKUM UPAH ANAK KELUARGA MUSLIM OLEH PENGASUH NON MUSLIM
DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI**

(Studi Komparatif Terhadap Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Maliki)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh:

Maulana Yusuf

1621030040

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I: Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H/ 2021 M

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B/b	Be
ت	Ta	T/t	Te
ث	Sa	S/s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J/j	Je
ح	Ha	H/h	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh/kh	Ka dan Ha
د	Dal	D/d	De
ذ	Zal	Z/z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R/r	Er
ز	Zai	Z/z	Zet
س	Sin	S/s	Es
ش	Syin	Sy/sy	Es dan Ye
ص	Sad	S/s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D/d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T/t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘-	Apostrof terbalik
غ	Ga’in	G/g	Ge
ف	Fa	F/f	Ef
ق	Qof	Q/q	Qi
ك	Kaf	K/k	Ka
ل	Lam	L/l	El
م	Mim	M/m	Em
ن	Nun	N/n	En
و	Wau	W/w	We
ه	Ha	H/h	Ha
ء	Hamzah	-‘	Apostrof
ي	Ya	Y/y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vocalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيْ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
نَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / ا...َ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	- a	A dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah dan ya</i>	- i	I dan garis di atas
اُ	<i>Dammah dan wau</i>	- u	U dan garis di atas

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

اَلْحِكْمَةُ : al hikmah

5. ***Syaddah (tasydid)***

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (◌ْ), dalam literasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanaa^ˀ

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الْبِلَادُ : al-bilaḍu



ABSTRAK

Dalam masyarakat saat ini pada umumnya memiliki pengasuh anak yang bertujuan untuk membantu mengurus anak-anak mereka, para orang tua melakukan hal tersebut agar anak-anak tetap terurus dan terawat saat orang tua beraktivitas diluar rumah.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Hukum Upah Asuh Anak Non-Muslim Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki dan Faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan dan persamaan tentang upah Asuh Anak Non-Muslim dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki. sehingga peneliti memiliki tujuan untuk meneliti perkara tersebut untuk menentukan boleh atau tidaknya pemberian upah terhadap pengasuh anak non muslim menurut pandangan dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena peneliti mengumpulkan data-data dari buku , majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah. Jenis penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan) dengan data primer dan data skunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis fikih muamalah tentang upah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian upah pengasuh anak non muslim berbeda pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Menurut Imam Syafi'i pemberian upah terhadap pengasuh anak non muslim tidak diperbolehkan. Alasan ini merujuk pada pengasuh anak muslim mesti orang yang beragama muslim pula. Sedangkan menurut Imam Maliki pemberian upah terhadap pengasuh anak non muslim adalah sah-sah saja. Adapun faktor yang menjadi pengaruh dari persamaan dan perbedaan dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki adalah permasalahan agama yang dianut oleh pengasuh anak. Imam Syafi'i mewajibkan beragama Islam bagi pengasuh anak muslim sedangkan Imam Maliki menggugurkan kewajiban tersebut.

Kata kunci : upah, pengasuh, imam syafi'i dan imam maliki.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulana Yusuf
NPM : 1621030040
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Upah Asuh Anak Non Muslim Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Maliki" adalah benar-benar merupakan karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun seduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnone* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terjadi penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2021

Penulis,



Maulana Yusuf
NPM.1621030040



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: Upah Asuh Anak Non Muslim Pandangan Imam Syafi'i
Dan Imam Maliki**

Nama : Maulana Yusuf

NPM : 1621030040

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sifi Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

NIP. 196706041997032004

NIP. 19690511998031003

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 19780725 200912 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Upah Asuh Anak Non Muslim Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Maliki”** disusun oleh, **Maulana Yusuf, NPM: 1621030040**, Program Study : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**.
UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 08 Juli 2021.

Tim Penguji

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

(.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag.

(.....)

Penguji I : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I

(.....)

Penguji II : Dr. Siti Mahmudah, S.Ag., M.Ag.

(.....)

Penguji III : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 1962022 199303 1 002

MOTTO

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَّابِتْ أَسْتَعِجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنْ أَسْتَعَجَرْتُ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي ﴿٦٧﴾
حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ^ع
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٨﴾

“Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syaiikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan diselesaikannya Skripsi ini Penulis mempersembahkannya kepada:

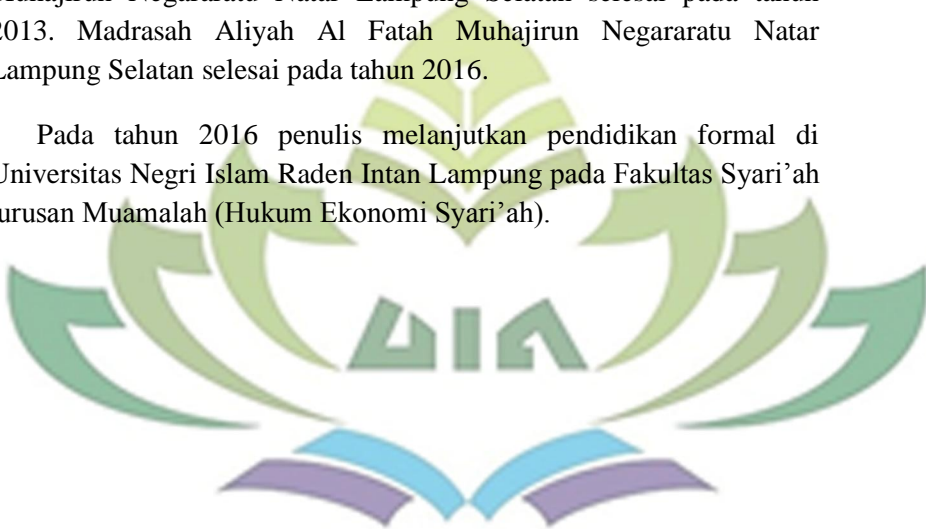
1. Keluarga besar penulis yang selalu mensupport untuk menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan panjangkan usia serta melindungi dan memuliakan mereka, baik di dunia maupun di akhirat.
2. Bapak Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Teman Teman seperjuangan baik di dalam kampus maupun diluar kampus yang selalu mensupport untuk menyelesaikan skripsi ini semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap peneliti adalah Maulana yusuf dilahirkan di Muhajirun Negararatu natar Lampung Selatan, pada tanggal 01 Oktober 1997. Peneliti adalah anak ke sebelas dari 12 bersaudara, Dari pasangan Bapak Bisri dan Ibu Suhaibah, dengan riwayat pendidikan dimulai dari Taman kanak-Kanak Al Fatah Muhajirun Negararatu Natar Lampung Selatan selesai pada tahun 2004. Madrasah Ibtidaiyah Al Fatah Muhajirun Negararatu Natar Lampung Selatan selesai pada tahun 2010. Madrasah Tsanawiyah Al Fatah Muhajirun Negararatu Natar Lampung Selatan selesai pada tahun 2013. Madrasah Aliyah Al Fatah Muhajirun Negararatu Natar Lampung Selatan selesai pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan formal di Universitas Negri Islam Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan kepada seluruh umatnya dalam hidup ini. Shalawat beriring salam jua senantiasa kita curahkan kepada baginda kita yakni lelaki insan mulia Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari masa kelam yang gelap gulita menuju masa bercahaya dimana manusia telah tak lagi jahilliyah seperti sedia kala. Tiada kata yang pantas selain kalimat tasyakur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, kemudahan dalam aktifitas dan ridha serta Inayah-Nya sehingga diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Upah Asuh Anak Non-Muslim Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Maliki”**

Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program sarjana satu (S1) di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam hal penulisan skripsi ini tentunya tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan dari semua pihak, oleh karena itu ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri.,M.Ag beserta staff jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., dan para wakil Dekan fakulta Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan.
3. Ketua Jurusan Muamalah, Khoiruddin.,M.S.I dan sekretaris jurusan Muamalah yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Pembimbing I Dr. Siti Mahmudah, S.Ag. M. Ag dan pembimbing II Relit Nur Edi,S.Ag.,M.Kom.I. yang telah banyak mengeluarkan waktu tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan masukan dengan penuh kesabaran dan memotivasi agar skripsi ini dapat segera terselesaikan.

5. Tim penguji Skripsi, ketua sidang....., penguji I....., penguji II....., penguji III dan sekretaris sidang.....
6. Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan pengetahuan dan ilmu baru serta staff dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang juga membantu kelancaran skripsi ini.
7. Pemimpin serta staf perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, referensi, serta bantuan dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan Taufik-Nya sebagai balasan atas doa dan bantuan serta bimbingan yang mereka berikan, Amin Yarobbal a'lam.

Bandar Lampung, 2021
Penulis

Maulana Yusuf
Npm. 1621030040

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	viii
PENGESAHAN.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode penelitian	8
I. Sistematika penelitian	10

BAB II UPAH ASUH ANAK NON-MUSLIM DALAM ISLAM BERDASARKAN PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI

A. Upah	11
1. Pengertian Upah dan Dasar Hukum Upah	11
a. Pengertian Upah.....	11
b. Dasar Hukum Upah	13
2. Rukun dan Syarat Upah.....	17
3. Macam-macam dan Jenis Upah	20
4. Sistem Pengupahan dalam Islam	23
5. Standar Pengupahan dalam Islam	38

B. Hadhanah	42
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hadhanah	42
a. Pengertian Hadhanah.....	42
b. Dasar Hukum Hadhanah	45
2. Syarat-Syarat Hadhanah	54
3. Orang yang Berhak atas Hak Asuh Anak	59
C. Pengasuh Anak Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki	62

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG UPAH ASUH ANAK NON MUSLIM MENURUT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI

A. Biografi imam syafi'i dan imam maliki	65
1. Imam syafi'i.....	65
2. Imam maliki	74
B. Pandangan imam syafi'i dan imam maliki tentang upah asuh anak non-muslim	79

BAB IV ANALISIS PEMBERIAN UPAH ASUH ANAK NON-MUSLIM MENURUT PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI

A. Hukum Upah Asuh Anak Non-Muslim dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki.....	83
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perbedaan dan Persamaan dalam Upah Asuh Anak Non-Muslim dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Rekomendasi	94

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

UPAH ANAK KELUARGA MUSLIM OLEH PENGASUH NONO MUSLIM DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi dan menghindari adanya multi tafsir atau bahkan adanya kesalahpahaman bagi pembaca, Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak ada terjadi salah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. skripsi ini berjudul **“Upah Anak Keluarga Muslim Oleh Pengasuh Nono Muslim Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Maliki”**

Adapun beberapa istilah yang dapat didefinisikan dari judul tersebut adalah sebagai berikut :

a. Upah

Upah dalam bahasa Arab sering disebut dengan *ajruna* atau *ajran* yang berarti memberi hadiah atau upah, dalam pengertian *syara'* adalah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu¹.

b. Asuh Anak

Asuh anak adalah menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya. Asuh yang dimaksud ialah cara yang dipilih dalam mendidik anak-anak yang meliputi bagaimana cara memperlakukan anak.² Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI), arti dari asuh anak adalah anak kecil yang diberi

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: Alma'arif 1987), 7.

² Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar-mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 96.

biaya pendidikan (oleh seseorang), tetapi tetap tinggal pada orang tua nya.³

c. Non-muslim

Yang dimaksud dengan Non-Muslim adalah orang yang tidak menganut agama Islam, mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya.⁴

d. Pandangan

Pandangan adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan.⁵

e. Imam Mazhab

Imam Mazhab yaitu para ulama fiqih yang mempunyai metodologi khusus yang digunakan untuk memilih berbagai jenis hukum dalam Islam. Mazhab juga bisa diartikan sebagai teori maupun akidah yang dirumuskan oleh para imam mazhab.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya akan terus melakukan hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhan perekonomian atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut manusia saling berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan ada pula yang berlomba untuk menyediakan pekerjaan seperti berdagang dan ada pula yang menyediakan jasa.

Semakin dewasanya zaman saat ini, bidang jasa yang disediakan oleh penyedia layanan jasa semakin banyak dan berkembang, sehingga hal ini memacu para lembaga penyedia layanan jasa untuk membuat lembaga-lembaga penyalur

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 470.

⁴ Pengertian "Non-Muslim" (Online) tersedia di: <http://www.santricendikia.com/2012/04/sikap-muslim-terhadap-non-muslim>. diunduh pada tanggal (11-08-2015 pukul 21.33 WIB)

⁵ Purwodarminto, *Nilai-nilai karakter*, (Jakarta: Balaipustaka, 1990), 975.

⁶ Sabil Had dan Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Imam 4 Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 7.

ketenagakerjaan yang banyak dicari oleh para ibu rumah tangga salah satunya adalah jasa pengasuh anak.

Banyaknya tenaga kerja dibidang pengasuhan terhadap anak menyebabkan lembaga penyedia jasa pengasuh anak untuk menyediakan jasa lebih banyak lagi demi memenuhi kebutuhan dari para calon penerima jasa tersebut. Tugas dari pengasuh anak adalah untuk membantu para ibu dalam memberikan pengasuhan, pendidikan, pengajaran serta peran dari seorang ibu, memberi makan, minum, mengajak dan menemani anak yang diasuhnya bermain.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab utama banyaknya orang tua untuk memberikan anak-anaknya kepada pengasuh adalah banyaknya para ibu yang ikut andil dalam mencari rezeki atau berkarir diluar rumah, sehingga mau tidak mau orang tua harus menyerahkan tugasnya kepada pengasuh anak-anaknya. Tujuannya tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang didasarkan pada kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan.⁷

Banyaknya kebutuhan akan jasa pengasuh anak, hal ini menyebabkan para pencari tenaga kerja tersebut tanpa memperhatikan secara rinci dari individu calon pengasuh untuk anak-anaknya. Padahal latar belakang dari pengasuh anak haruslah sangat diperhatikan guna menjaga anak-anak mereka agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tugas dari seorang pengasuh anak adalah sebagai pengganti dari kedua orang tuanya, artinya yang memberikan pengajaran, pendidikan, pengetahuan serta kebutuhan-kebutuhan anak akan dikerjakan oleh pengasuh anak. Jika pengasuh seorang anak tidak memiliki kepribadian yang baik maka hal ini dapat mempengaruhi kepribadian anak yang diasuhnya pula. Terlebih jika pengasuh anak adalah non-muslim.

Namun fakta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari banyak para orang tua yang memberikan kepercayaan pengasuhan anaknya kepada pengasuh non-muslim, alasan yang

⁷ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung Gaji*, (Jakarta: Praninta Offset, 2008),4.

mendasar adalah karena orang tua sudah mengenal sosok pengasuh tersebut sehingga tanpa adanya keraguan memberikan kepercayaan pengasuhan anak-anaknya kepada pengasuh non-muslim.

Sebenarnya sifat dan karakteristik antara muslim dan non-muslim adalah berbeda dimana pengajaran yang dimiliki oleh masing-masing pemeluk agama memiliki prinsip kepercayaan yang tidaklah sama, sehingga dapat dikatakan jika orang tua yang memberikan kepercayaan anak-anaknya diasuh oleh pengasuh non-muslim dapat menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran seperti anak-anak yang diberikan pengetahuan pendidikan sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh pengasuh non-muslim tersebut.

Pekerjaan menjadi seorang pengasuh anak sangatlah membantu bagi orang tua yang sibuk bekerja dan tidak sempat mengurus rumah tangga tapi banyak dampak yang terjadi yaitu adanya kesenjangan antara orang tua dan anak karena waktu yang dihabiskan lebih banyak dengan pengasuhnya dari pada dengan orang tua sendiri, pengaruh panjangnya perilaku anak bisa berubah, anak cenderung lebih nyaman berada disisi pengasuhnya dari pada dengan kedua orang tuanya.

Dengan demikian peran kedua orang tua akan benar-benar tergantikan oleh pengasuh yang dipercayainya, dengan adanya pengasuhan tersebutlah kedua orang tua si anak memiliki kewajiban untuk memberikan upah kepada pengasuh anak baik yang muslim maupun non-muslim. Kewajiban pemberian upah terhadap pekerja telah ditegaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Ahqaf (46): 19.

وَلِكُلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi

mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”⁸

Ayat diatas memerintahkan kepada para penerima jasa untuk memberikan upah kepada karyawan-karyawan mereka tanpa menyebutkan muslim ataupun non-muslim. Akan tetapi apakah menjadi pengasuh sudah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh agama lantas bagaimana menurut pandangan ulama fiqh tentang upah pengasuh yang sampai saat ini pemikiran atau gagasannya masih diterapkan dalam kehidupan khususnya bagi orang yang beragama Islam diantara yaitu imam Syafi’i dan Imam Maliki dimana pandangan mereka dalam hal ini berbeda-beda. Menurut pandangan Imam Syafi’i bahwa wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dari berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Sedangkan menurut pandangan Imam Maliki menerangkan bahwa wanita pengasuh tidak berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya.⁹

Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji pemikiran Imam Syafi’i dan Imam Maliki tentang bagaimana upah asuh anak non muslim.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini berfokus pada penetapan upah asuh anak yang dilakukan oleh non-muslim dalam Pandangan imam Syafi’i dan imam Maliki. Kemudian fokus penelitian tersebut akan dikembangkan menjadi beberapa sub-fokus yang akan diteliti oleh penulis, diantaranya:

- a. Upah asuh anak non-muslim
- b. Pandangan imam syafi’i dan imam maliki tentang upah terhadap pengasuh anak.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 402

⁹ Muhammad jawad mughniyah, *fiqh lima mazhab*. 418-419.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hukum Upah Asuh Anak Non-Muslim Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan dan persamaan tentang upah Asuh Anak Non-Muslim dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki?

E. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang ingin dicapai baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah Memberikan penjelasan hukum bagaimana upah Asuh Anak Non- Muslim dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan mengembangkan keilmuan mengenai pelaksanaan hukum upah anak non-muslim. Karena dilihat secara fisual masih banyaknya masyarakat yang mengabaikan pemberian hak asuh anaknya terhadap seseorang yang tidak sama kepercayaan spiritualnya. Selain itu diharapkan pula dapat memperkaya pengetahuan civitas akademik Fakultas Syariah pada umumnya dan jurusan Muamalah khususnya, serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar

sarjana hukum (S.H) pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejauh penelusuran peneliti selama ini belum ada yang membahas secara spesifik terkait dengan skripsi “Upah Asuh Anak Non-Muslim dalam Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Maliki”

Pertama penelitian dari, Rifa Atul Mahmudah dengan Judul Skripsi “Analisis Fikih Empat Imam Mazhab Terhadap Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ibu Murtad Karena Anak Masih dalam Masa Akhir Persusuan” hasil dari penelitian yang dilakukan oleh rifa berisikan tentang pandangan empat imam mazhab terkait hadhanah yang dilakukan oleh orang yang murtad yang disandingkan dengan Putusan Agama No.0117/P dt.G/2016/PA.Prgi bahwa hakim memberikan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz kepada ibu murtad karena anak masih dalam akhir masa persusuan yang tentunya belum mumayyiz.¹⁰

Kedua penelitian dari, Eka Fitriani dengan Judul Skripsi “ Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengasuh Anak dari Istri Yang Murtad (Analisis Terhadap Imam Mazhab)” dalam penelitian ini memiliki simpulan bahwa para imam mazhab berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya seorang istri murtad dalam mengasuh anak. Imamiyah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam.¹¹

¹⁰Rifa Atul Mahmudah, “*Analisis Fikih Empat Imam Mazhab Terhadap Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ibu Murtad Karena Anak Masih dalam Masa Akhir Persusuan*”, (skripsi, program sarjana hukum fakultas syariah UIN sunan ampel surabaya, 2018), 101

¹¹ Eka Fitriani, “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengasuh Anak Dari Istri Yang Murtad (Analisis Terhadap Imam Mazhab)*”, (skripsi, program sarjana hukum UIN Allauddin Makasar, 2019), 82

Oleh karena itu penelitian akan berlanjut karena belum ada peneliti yang meneliti penelitian yang saya lakukan yakni dengan judul “**Upah Anak Keluarga Muslim Oleh Pengasuh Nono Muslim Dalam Pandangan Imam Syafi’i Dan Imam Maliki**”

H. Metode Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari pembahasannya jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan literatur seperti : buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya.¹²

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian di atas, maka penelitian ini bersifat Deskriptif Komparatif, seperti dikemukakan oleh Bogdan Taylor Deskriptif yaitu suatu penelitian yang membahas dan menggambarkan data yang telah ada dan apa adanya sesuai kondisi yang ada.¹³

Penelitian ini mendeskripsikan tinjauan hukum tentang upah asuh anak non-muslim menurut pandangan Imam Syafi’i dan Imam Maliki.

2. Sumber data

Untuk memperoleh data maka pengumpulan data berdasarkan pada literatur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dikelompokkan berdasarkan

¹²*Ibid*,28.

¹³Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Rajawali Pers, 1994),139.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama, data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.¹⁴ Data primer didapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yaitu tentang upah asuh anak non-muslim menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki.

b. Data sekunder

Data sekunder menurut Abdurrahmat Fhatoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen.¹⁵

Kedua sumber data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, yaitu data yang ada pada lapangan dan data yang ada pada kepustakaan. Dengan menggunakan data primer dan sekunder tersebut maka data yang tergabung tersebut dapat memberikan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai jurnal yang berhubungan dengan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki tentang upah asuh anak non-muslim.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan maka dari itu alat yang digunakan adalah pengumpulan data literature yaitu bahan-bahan pustaka yang koheren dan objek pembahasan yang dimaksud.¹⁶ Data yang ada dalam kepustakaan tersebut diolah dengan cara:

¹⁴ Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 21.

¹⁵ *Ibid*, 6

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 24.

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data terutama dari segi kelengkapan kejelasan makna.
- b. *Organizir* yaitu mengorganizir data yang sudah diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
- c. Penemuan hasil penelitian yaitu menemukan analisis lanjutan terhadap hasil perorganisasian data dengan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil dari rumusan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini secara teknis berisi V bab yang didalamnya saling berkaitan antara bab I sampai dengan bab ke-V dengan uraian sebagai berikut:

1. Bab pertama memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. BAB kedua berisi tentang landasan teori yang dijadikan referensi dan rujukan sebagai penguat dari penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan Upah Anak Keluarga Muslim Oleh Pengasuh Non Muslim Dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Imam Maliki
3. BAB ketiga dalam skripsi ini memuat tentang gambaran umum objek penelitian yang dikaji serta penulis juga menyajikan fakta dan data penelitian.
4. BAB keempat berisikan tentang analisis dari penelitian yang dikaji dan
5. BAB kelima atau terakhir berisikan tentang simpulan dan rekomendasi yang tepat untuk penelitian yang dilakukan.

BAB II

UPAH ANAK KELUARGA MUSLIM OLEH PENGASUH NON MUSLIM DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI

A. Upah

1. Pengertian Upah dan Dasar Hukum Upah

a. Pengertian Upah

Upah atau imbalan dalam bahasa Arab disebut juga *ijarah*. Karena itu lafal *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.¹⁷

Upah atau *ijarah* berasal dari kata جَرَّ ^ا menurut etimologi *ijarah* berarti بَيْعُ اِ مَنَفْعَةٍ (menjual manfaat).¹⁸ Pemilik yang menyewakan manfaat disebut mu'ajjir (orang yang menyewakan). Sedangkan pihak lain yang memberikan sewa disebut musta'jir (orang yang menyewa atau penyewa). Sesuatu yang diadakan untuk diambil manfaatnya disebut ma'jur (sewaan), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ajran atau ujrah (upah).¹⁹

Upah menurut terminologi ensiklopedi Islam menyebutkan bahwa *ijarah* atau upah adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Dengan kata lain, *ijarah* merupakan pemilikan manfaat dari sesuatu yang halal dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ganti rugi.²⁰

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Nusa Jaya, 2005), 29

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 318

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki, Cet. 2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 18

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, Dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Cet. Xi, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 229

Para ulama berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.²¹
- b) Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.²²
- c) Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”. Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah: “Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”. Menurut Sayyid Sabiq bahwa upah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah ialah: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan harta dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberikan ganti menurut syarat-syarat tertentu.²³

Upah menurut Afzalur Rahman adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam sebuah

²¹ Abdurrahman Al-Jaziri. T.Th. Al-Fiqh „Ala Madzahib Al-Arba” Ah. Beirut: Dar Al-Qalam. Dikutip Oleh Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) ,114

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

produksi.²⁴ Menurut Muchdarsyah sinungan, upah kerja adalah pencerminan pendapatan nasional dalam bentuk upah uang yang diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dicurahkan untuk pembuatan suatu produk.²⁵

b. Dasar Hukum Upah

Dalam Islam dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan untuk menentukan boleh atau tidak nya suatu perkara untuk dikerjakan merujuk pada Qur'an dan Hadist Nabi SAW. disamping itu ada beberapa rujukan yang juga dapat dijasikan sebagai landasan atau dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara, diantaranya adalah ijma', qiyas, fatwa. Adapun dasar hukum pengupahan yang berpijak pada Al-Qur'an diantaranya:

1) Q.S. Al-Qashash (28): 26-27.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَىٰ اسْتَعْجِرُهُ إِن خَيْرٌ مِّنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ بِكَ بِمَا كُنْتَ عَلَيْهِمْ نَافِثِينَ ۖ فَمِنْ غَدٍ
تَأْجُرُنِي ثُمَّ نَنصِبْكَ وَهُمْ قَوْمٌ لَا يَخِفُونَ ۖ قَالَ إِنِّي خَشِيتُكَ وَلَئِنْ كُنْتُ إِلَّا
بِإِذْنِ رَبِّكَ فَاعْلَمْ ۚ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah ia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syaikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta : Dhana Bakti Wakaf, 1995),361.

²⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Produktifitas Apa Dan Bagaimana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000),90.

anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”²⁶

2) Q.S. At-Taubah (9): 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”²⁷

3) Q.S. Al-Ahqaf (46): 19.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوفيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”²⁸

4) Q.S. An-Nahl (16): 97.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Maghfirah Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 388.

²⁷ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 150

²⁸ *Ibid.* 402

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ



Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”²⁹

5) Q.S. Al-Kahfi (18): 30

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ
أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ

Artinya: “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh, tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.”³⁰

Selain dasar hukum upah yang bersumber dari Al-Qur'an dasar hukum upah terdapat pula dalam hadist Nabi Muhammad SAW. diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hadist Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan dari Ibnu Majah:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا أَلَّا جَزَأَ جَزَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya

²⁹ Ibid. 222

³⁰ Ibid.237.

sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah: 397”

Maksud dari hadits ini adalah bersegera menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan, karena menunda pembayaran gaji pegawai bagi majikan yang mampu adalah suatu kezaliman.³¹ Sehingga sudah menjadi kewajiban bagi penerima jasa untuk segera membayar upah kepada pemberi jasa atau pekerja setelah pekerja selesai melakukan pekerjaan yang diamanahkan kepadanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelum ditunaikannya suatu pekerjaan itu.

- 2) Hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan dari imam Bukhari:

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَلَا أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلًا أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلًا بَاغَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلًا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَأَسْتَوَى وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Artinya : Telah menceritakan kepada saya Bisyr bin mahrum telah menceritakan kepada kami Yahyya bin Sulaim dari Ismail bin Ummayah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah radliallahu „anhu dari Nabi shallallahu „alaihi wasallam bersabda : “Allah Ta’ala berfirman : Ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (upah dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu

³¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124

memnyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya. (Hadits Imam Bukhari No. 2075)³²

Dalam hadist ini menyejelaskan bahwa suatu ketentuan, ada tiga orang yang sangat dibenci Allah, dan salah satunya yaitu orang yang menyewa tenaga seorang pekerja (pemberi jasa) lalu pekerja itu menunaikan transaksinya, sedangkan upahnya tidak diberikan oleh penerima jasa.

2. Rukun dan Syarat Upah

Adapun rukun dan syarat dalam pengupahan meliputi :³³

a. Mu'jir dan Musta'jir

Mu'jir dan Musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Mu'jir adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, diisyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah SWT berfirman dalam (Q.S. An-Nisa (4): 29):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka. Dan janganlah

³² Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Bandung : Al-Ma'Arif),
Juz Ii, 28

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2013),
117-118

kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa (4): 29).³⁴

Bagi masyarakat yang hendak melakukan akad *ijarah* disarankan untuk mengetahui manfaat barang yang hendak diadakan secara mendetail atau secara sempurna, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya sebuah perselisihan antara oarang-oarang yang melakukan akad.

- b. Shighat, ijab Kabul antara mu"jir dan musta"jir, ijab Kabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab Kabul sewa-menewa misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5000,00", maka musta"jir menjawab "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Ijab Kabul upah mengupah misalnya seorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5000,00", kemudian musta"jir menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan".
- c. Ujrah, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.
- d. Barang Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut:
 - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menewanya dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya,
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upahmengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa menyewa),

³⁴ Departemen Agama Ri, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2000), 65

- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (haram),
- 4) Benda yang disewakan diisyaratkan kekal 'ain (zat)nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.³⁵

Adapun syarat-syarat upah menurut Abdul Aziz Dahlan dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedia Islam, yaitu :

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Hambali disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti anak kecil dan orang gila *ijarah*nya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafi berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus dalam usia baligh. Oleh karenanya anak yang baru mumayyizpun boleh melakukan akad *ijarah* hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.
- b. Kedua belah pihak berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah*nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisaa (4) : (29).
- c. Manfaat yang menjadi objek dari *ijarah* harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- d. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan suatu yang tidak boleh

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), H.118

diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syarak. Oleh sebab itu, para ulama fikih sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seorang untuk menyantet.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- g. Objek *ijarah* itu merupakan suatu yang biasa disewakan.
- h. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis.³⁶

Sedangkan Menurut Saleh al-Fauzan dalam buku yang berjudul *fiqh sehari-hari* menyebutkan bahwa syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. *Ijarah* berlangsung atas manfaat.
- b. Manfaat tersebut dibolehkan.
- c. Manfaat tersebut diketahui.
- d. Jika *ijarah* atas benda yang tidak tertentu maka harus diketahui secara pasti ciri-cirinya.
- e. Diketahui masa penyewaan.
- f. Diketuainya ganti atau bayarannya.
- g. Upah sewa berdasarkan jerih payah yang memberikan jasa.³⁷

3. Macam-macam dan Jenis Upah

- a. Upah dibedakan menjadi dua yakni :
 - 1. Upah yang sepadan (*ujrah al mithli*)

Ujrah al mithli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 661-662.

³⁷ Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari - Hari*, (Jakarta: Gemainsani, 2006), 483.

oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembelian jasa tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukannya tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.³⁸

2. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al - musamma*)

Upah yang disebut (*ujrah al - musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak mu' jir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syarak. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajr al-mithli*).³⁹

³⁸ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* , (Jakarta: Logos, 1999), 99-100.

³⁹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 10

b. Jenis-jenis upah

Adapun jenis – jenis upah pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya :

1. Upah atas ibadah⁴⁰

Para ulama berbeda pendapat dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan pada Allah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ijarah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan kepada Allah seperti menyewa orang lain untuk sholat, puasa, haji atau membaca Alquran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah orang tua yang menyewa menjadi muazin, menjadi imam, dan lain – lain yang sejenis, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah saw. :”bacalah olehmu Alquran mu dan janganlah kamu cari makan dengan jalan itu.”⁴¹

2. Mengupah ibu menyusui yang dimaksud adalah bukan ibu

kandungnya. karena seorang laki – laki tidak boleh mengupah istrinya untuk menyusui anaknya sendiri karena ini merupakan suatu kewajiban atasnya dalam hubungan antara dia dan Allah Swt.⁴²

Mengupah ibu menyusui yang dimaksud adalah ibu inangnya. Boleh mengupah ibu susu selain ibu dengan upah tertentu. boleh juga dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya. Ketidak jelasan upah dalam kondisi ini

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 280.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Alma'arif, 1988), 21.

⁴² *Ibid.* 155

tidak akan menimbulkan persengketaan. Biasanya pengupah bermurah hati dan bersikap dermawan kepada inang demi kasih sayangnya kepada anak. Sehingga dalam kasus ini mengupah ibu menyusui dalam artian ibu inangnya adalah dibolehkan.

3. Mengupah orang dengan imbalan pakaian dan makanan

Abu Hanifah membolehkan dalam konteks jasa menyusui oleh selain pembantu (pelayan). Sedangkan Imam Syafii, Abu Yusuf, Muhammad Hadiwiyah dan al-Manshur Billah berpendapat tidak sah karena upah yang akan diterima dianggap tidak konkret.⁴³

Ulama Mazhab Maliki yang membolehkan untuk mempekerjakan pekerja dengan imbalan makanan yang dimakannya dan pakaian yang dipakainya berpendapat bahwa hal itu disesuaikan dengan tradisi adat istiadat yang berlaku di suatu tempat tersebut.

4. Perburuhan

Di samping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuhan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.⁴⁴

4. Sistem Pengupahan dalam Islam

Penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja sama merupakan sesuatu yang harus dilakukan hal ini dilakukan untuk mencegah apabila terjadi suatu perselisihan di

⁴³ *Ibid.* 221

⁴⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1984), 325.

antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'u*.⁴⁵

Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan Upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuakannya dengan biaya hidup dalam batas minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan mengurangnya apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan masyarakat. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargaisehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang di berikan oleh si pekerja itu.⁴⁶

Islam mengatur betul tentang pengupahan yang ada, sehingga dalam pengupahan secara detail akan diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh para pekerja, hal ini dilakukan agar adanya keseimbangan antara seseorang yang memiliki banyak keahlian dengan seseorang yang biasa saja. Dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa (4):(32), disebutkan bahwa:

⁴⁵ Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet Widjajkusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hlm. 19

⁴⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Nusa Jaya, 2005),35.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
 مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
 فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٧﴾

Artinya :” Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yg mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yg mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”⁴⁷.

Menetapkan upah yang adil bagi sorang pekerja sesuai kehendak syari’ah, bukanlah pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran apa yang akan dipergunakan, yang dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Kesulitan ini pernah dialami sahabat ketika menetapkan gaji Khalifah Abu Bakar, setelah dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pedagang. Umar AlKhatab bersama sahabat lain menetapkan gaji Abu Bakar dengan standar yang mencukupi kehidupan seorang muslim golongan menengah. Penetapan gaji seperti ini masih samar, dan Abu Bakar akhirnya mengusulkan, “seungguhnya saya adalah seorang pedagang maka ukurlah itu dengan dirham...” Usulan ini diterima dan sahabat menetapkan 12 (dua belas) dirham perhari. Sesuai dengan ketentuan hadist Nabi tentang pelaksanaan pembayaran upah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Hurairah dimana hadist

⁴⁷ Departemen Agama RI, Al - Quran Dan Terjemahannya ..., 118.

tersebut memberikan petunjuk agar upah buruh segera dibayarkan.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا أَلَّا جَزَأَ جَزَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah: 397”.⁴⁸

Dalam hadist diatas menyebutkan bahwa pemberian upah kepada pekerja haruslah segera ditunaikan sesuai dengan kesepakatan pembayaran yang telah diadakan sebelum terjadinya pemberian dan penerimaan jasa antara pekerja dan penerima jasa hasil pekerja tersebut. Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu. Maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut, misalnya orang yang menyewa rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan tersebut telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan, jika akad ijarah untuk suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya, pada waktu berakhirnya pekerjaan.⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa upah disyaratkan harus:

1. Berupa harta yang dapat diketahui keberadaanya
Persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang artinya barang siapa mempekerjakan pekerja hendaklah ia memberitahu upahnya.⁵⁰

⁴⁸ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, (Surabaya, Indonesia: Ahmad Ibn Sya“Diah Cet. 1), 188

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 209.

⁵⁰ Wahbah Az - Zuhayli, *Al - Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu Abdul Hayyie Al Kattani*, Jilid:V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 400.

2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah seperti menyewa rumah untuk ditempati dengan upah secara sewa menempati rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan yang serupa.⁵¹

Mengenai perkiraan upah Taqiyudin an-Nabhani menyatakan bahwa dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga barang atau biaya dalam memproduksi, karena upah dengan harga itu sendiri merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari adanya jual beli, sedang upah berangkat dari ijarah, dan juga karena upah itu merupakan kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya selama upah tersebut ditentukan di antara keduanya, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau menurunkan upah seenaknya sendiri dengan alasan turun dan naiknya harga. Di lain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan menyebabkan keluarnya seorang pekerja, yang terjadi ketika barang dipasaran secara keseluruhan merosot.⁵²

Menurut Al-Maliki, hanya ada satu cara untuk menetapkan upah pekerja yaitu mendasarkan upah tersebut pada jasa atau manfaat yang dihasilkan pekerja. Ia menegaskan, “Transaksi jual beli itu berlangsung dengan kerelaan dua orang yang bertransaksi jual-beli tersebut. Begitu juga, pengontrakan manfaat tenaga kerja berlangsung dengan kerelaan antara ajir dan musta’jir. Jika keduanya telah sepakat atas satu upah, sedang upah tersebut telah disebutkan (Al-Ajru al-Musamma), maka keduanya telah terikat dengan

⁵¹ *Ibid.*404.

⁵² Aqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996),107.

upah tersebut. Dan jika keduanya tidak sepakat atas suatu upah, maka keduanya telah terikat dengan apa yang dikatakan oleh para ahli di pasar umum terhadap manfaat tenaga kerja tersebut (*Al-Ajru al-Mitsl*). Hanya saja upah ini tidak bersifat abadi, namun terikat dengan masa tertentu yang telah disepakati oleh keduanya, atau dengan pekerjaan yang disepakati untuk dikerjakan.

Jika masanya telah berakhir, atau pekerjaannya telah selesai, maka ia mulai lagi ketentuan baru terhadap manfaat tenaga ketika melakukan ketentuan upah. Menentukan upah sepenuhnya pada mekanisme pasar tenaga kerja, tanpa ada control sangat berbahaya. Benar Ibn Taimiyah menawarkan gagasan upah yang setara (*Al-Ajru al-Mitsl*) dengan memperlakukan tenaga kerja sama dengan barang dagangan yang tunduk pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Tetapi pada zaman itu peranan lembaga Hisbah sangat kuat, sehingga saat terjadi kezaliman antara ajir dan mustajir, lembaga Hisbah turun tangan menetapkan upah setara. Cara lain yang mungkin digunakan untuk menghitung upah pekerja dikemukakan Bani Sadr, sebagai berikut:

1. Menghitung pengeluaran seorang buruh bersama istri, dan anak-anaknya, menghitung kebutuhan minimum mereka itu masih bekerja, dan setelah itu baru bergantung pada keahlian dan seniornya.
2. Cara yang kedua, mencoba mendasarkan ganti rugi dengan mempertimbangkan buruh dalam hubungan dengan fungsinya pada proses produksi, jadi tergantung pada bagaimana dia member sumbangan terhadap produksi itu sendiri.

Menghitung kebutuhan hidup minimum pekerja bersama keluarganya sebagai standar pengupahan, yang banyak direkomendasikan pemikir muslim, lebih besar kemungkinan penerapannya dari pada pengupahan *ajrul almusamma* berdasarkan kerelaan kedua belah pihak

ketika transaksi dilaksanakan, dan atau ajrul al-mitsl yang tunduk pada penetapan ahli dasar pasar tenaga kerja.⁵³

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan upah adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Tenaga Kerja/*Musta'jir*

Al-Qur'an mendesak orang-orang beriman, yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja keras, dan Allah menjanjikan pertolongan bagi siapa saja yang berjuang dan berlaku baik. Dalam bagian lain Al-Qur'an menyerukan kepada setiap muslim agar menginvestasikan tenaga, pikiran, dan waktu melakukan amal saleh, amal yang produktif dan sangat merugi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, yang malas dan berpangku tangan, dan orang-orang yang bekerja tapi tidak menghasilkan manfaat. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah dalam QS an-Nahl (16): 97.

Al-Maliki menjelaskan tenaga kerja tidak selalu menghasilkan harta, kadang menghasilkan harta dan kadang tidak. Sebab manfaat tenaga tidak terbatas untuk menghasilkan harta, tetapi ada manfaat lain, selain harta. Tenaga yang dicurahkan dalam pertanian, perindustrian, atau perdagangan, akan menghasilkan harta, sedangkan jasa-jasa yang diberikan dokter, insinyur, pengacara, dosen dan profesi yang sejenisnya tidak menghasilkan harta. Jika pengrajin mengambil upah maka dia mengambil upahnya sebanding dengan harta yang dihasilkan.

⁵³Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), 40

⁵⁴*Ibid.*

Namun seorang insinyur apabila dia mengambil upah, maka dia tidak mengambil upahnya sebanding dengan harta yang dihasilkan, sebab dia tidak menghasilkan harta apapun, namun dia mengambil sebanding dengan manfaat yang dihasilkan kepada yang memberi upah (*musta'jir*). Kualitas dan kuantitas produksi sangat ditentukan oleh tenaga kerja. Oleh karena itu tenaga kerja merupakan sumber kekayaan yang sangat penting diantara sumber-sumber ekonomi yang lain: pertanian, perindustrian, dan perdagangan. Untuk memenuhi kualitas dan kuantitas produksi yang baik, maka perlu memperhatikan beberapa hal terkait tenaga kerja antara lain sebagai berikut:

1) Pembagian Tenaga

Kerja Pembagian tenaga kerja dan spesialisasi, menurut Ibn Khaldun, sangat penting karena semakin banyak spesialisasi kerja, semakin menambah kuantitas dan kualitas produksi, dan akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi, Muhammad Al-Mubarak membagi tenaga kerja dalam dua kategori:

Pertama, tenaga kerja ahli yang memiliki keahlian pada bidang tertentu. Seperti spesialisasi penerbangan, spesialis tenaga atom, ahli kedokteran dan sebagainya. Mereka ini akan mendapat upah yang tinggi karena mereka telah menghabiskan dana yang banyak dan waktu yang lama untuk sampai ke tingkat spesialisasi. Maka tidaklah adil apabila upah yang mereka terima sama dengan upah tukang sepatu, penjaga gedung, penjahit pakaian dan lain-lain.

Kedua, tenaga kerja kasar yang tidak memiliki keahlian tertentu, dan golongan ini

menempati jumlah terbanyak di antara tenaga kerja. Upah yang mereka terima lebih rendah dibandingkan dengan upah yang diterima golongan pertama.⁵⁵

2) Seleksi Tenaga Kerja

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban mutualistik antara pekerja dan yang mempekerjakan agar tidak terjadi tindakan kedzaliman yang dapat merugikan salah satu pihak, maka penetapan kriteria tenaga kerja sangat penting. Menurut Al-Mubarak, adalah satu dosa besar menempatkan seseorang yang tidak layak dan tidak kompeten pada pekerjaan tertentu. Adapun kriteria pemilihan tenaga kerja dalam Islam adalah sebagai berikut:

a) Keahlian

Keahlian dan kecakapan tenaga kerja merupakan pilihan pertama bagi Rasulullah dalam menempatkan seseorang pada jabatan tertentu. Tradisi ini terus dipertahankan oleh sahabat, generasi pasca generasi sahabat (tabi'in). Rasulullah memilih Mu'az bin Jabal sebagai Gubernur Yaman, karena beliau mengetahui kemampuannya.

Dengan pertimbangan kemampuan dan keahlian pula, khalifah Abu Bakr As-Siddiq menunjuk Umar al-Khatib untuk mengurus masalah hukum, Ali Bin Abi Talib mengurus tawanan perang dan Abu Ubaidah al-Jarrah pada pos keuangan (*bai al-mal*).

Abu Yusuf (113-182 H) memberikan saran kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, agar peran petugas keuangan memiliki pengalaman kerja (khibrah), memiliki kemampuan (kifayah), dan memiliki

⁵⁵ *Ibid.* 44

pengetahuan (ma'rifah). Menurut Afzalur Rahman, keahlian seorang tenaga kerja sangat tergantung pada pendidikan dan latihan. Dalam masyarakat industry maju, ketrampilan tenaga kerja sangat penting dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Dalam ajaran Islam, pendidikan dan pelatihan harus cuma-cuma untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.⁵⁶

b) Kesehatan moral dan fisik

Pemikiran ekonomi Islam yang berkaitan dengan kesehatan moral dan fisik sebagai salah satu kriteria pemilihan tenaga kerja diangkat dari kisah Nabi Syu'aib dalam kapasitasnya sebagai musta'jir dan Nabi Musa sebagai ajir, yang diabadikan dalam Al-Qur'an Surat AlQashah (28): 26.

Afzalur Rahman mengomentari ayat ini "bahwa kekuatan fisik (*al-qawi*) dan kejujuran (*al-amin*) sebagai kekuatan moral merupakan sifat yang diperlukan oleh sorang pekerja yang cakap. Sifat tersebut dimiliki oleh Nabi Musa dan justru karena hal itu beliau dicontohkan sebagai pekerja. Baik bagi buruh kasar ataupun tenaga kerja ahli, kejujuran merupakan satu unsure yang penting dalam bekerja.

c) Hal lain

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah aspek akal dan fikiran. Akal yang jernih dan fikiran yang cerdas, pertama diperlukan untuk memahami nilai-nilai normatif etika kerja, dan berguna untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Menurut Ahmad Syarbasyi, tinggi rendahnya derajat seseorang itu di hari akhirat kelak, sangat ditentukan oleh akal. Kriteria manusia berkualitas adalah manusia yang

⁵⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jil Ii* ,(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa , 2002),368-370 .

memiliki akal yang cerdas, berilmu pengetahuan, beriman, dan bermal saleh. Syarbasi dalam bukunya *Min Adab Al-Qur'an* mengangkat satu peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah, sebagai berikut: Ada seorang laki-laki sangat tekun beribadah, puasa sunah, berdzikir, membaca Al-Qur'an. Banyak orang yang mengagumi dan memujinya di hadapan Rasulullah. Rasulullah bertanya: "Bagaimana akal laki-laki itu? Mereka menjawab: Ya Rasulullah, kami laporkan kepada engkau ketekunannya beribadah dan kebajikannya, tapi engkau tanyakan akalnya?" Lalu Rasulullah berkata, "Orang bodoh itu jauh lebih berbahaya dari pada orang yang durhaka, dan diakhirat nanti ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh akalnya".

Etos Kerja Bekerja bagi umat Islam tentu tidak hanya dilandasi oleh tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Lebih dari itu, bekerja adalah untuk beribadah. Bekerja akan memberikan hasil. Hasil inilah yang memungkinkan kita dapat makan, berpakaian, tinggal di sebuah rumah, memberi nafkah keluarga, dan menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya secara baik.

Penekanan etos kerja atau etika kerja dalam sistem ekonomi Islam bukanlah sebuah pemikiran yang dibuat-buat, dimodifikasi dari serangkaian pemikiran di luar kerangka pemikiran Islam. Persoalan etika kerja telah mendapat perhatian penting dalam literatur Islam sejak berabad-abad yang lalu dari sejarah kaum muslimin. Ibnu Khaldun telah mengemukakan beberapa arus pemikiran ulama yang hidup pada zaman berkenaan dengan akhlak seorang pemimpin yang relevan untuk melandasi teori etos kerja bagi setiap tenaga ahli.

Ada beberapa etika kerja yang dikutip Ibn Khaldun. Misalnya yang termaktub dalam surat Thahir Bin Al-Husain kepada anaknya Abdullah bin Khadir yang ditunjuk Khalifah al-Ma'mun sebagai Gubernur. Menurut Thahir, bekerja adalah memanfaatkan waktu. Al-Qur'an memotivasi manusia agar menggunakan waktu dengan baik, menginvestasikan waktu dan tenaga kerja aktivitas-aktivitas yang bersifat "amal Shaleh". Ini menunjukkan bahwa Islam mempunyai konsep etos kerja tinggi dalam setiap aktifitas yang positif. Mengabaikan petunjuk Al-Qur'an tentang waktu, berarti satu kerugian. Seorang pekerja harus menyadari bahwa kerja adalah miliknya. Anda membuat gelas, gelas itu milik anda.

Islam mengajarkan agar setiap detik dari waktu harus di isi dengan 3 (tiga) hal yaitu, untuk meningkatkan keimanan, beramal shaleh (membangun) dan membina komunikasi sosial, firman Allah:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ



Artinya: "Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat

menasehati supaya menetapi kesabaran.” Q.S. Al-Ashr (103): 1-3.⁵⁷

Bila seorang bekerja untuk orang lain, dia akan memperoleh upah yang setara. Tenaga yang digunakan pekerja kurang dari waktu yang telah ditetapkan, akan merugikan musta’jir, baik pribadi perusahaan, ataupun Negara.

Oleh karena itu, dinegara industr maju, waktu merupakan symbol kesuksesan kerja dan uang. Sedangkan amanah dalam konteks etika kerja, menunjukkan pada integrasi antara hal yang harus diterima pekerja dan rasa tanggung jawab yang mendorongnya untuk memberikan yang terbaik bagi majikan atau perusahaan.

Setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi seorang pekerja dalam berperilaku jujur dan amanah. Pertama, keyaakinannya bahwa berusaha dan bekerja adalah satu kewajiban, dilaksanakannya pekerjaan dengan baik adalah ibadah dan mendapat pahala. Kedua, niat ikhlas bekerja untuk mencari keuntungan di dunia dan akhirat.

Etos kerja yang penting dalam Islam. Ibn Rusyd menetapkan amanah dalam dua kategori: pertama amanah terhadap Allah, dan kedua amanah sesama manusia, yang terakhir ini mencakup seluruh kegiatan ekonomi. Bagi Sayyidina Ali, amanah serta dengan keadilan dimana akeadilan harus ditegakkan dan amanah harus dilaksanakan.

Keduanya, merupakan syarat ang harus dimiliki bagi seorang imam atau pemimpin. Mengabaikan salah satu atau keduanya berarti meniadakan kewajiban bagi rakyat untuk ematuhinya. Hal ini tentu ada hubungannya dengan manajer.

⁵⁷ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 482

Sejauh mana seorang manajer mampu berlaku adil terhadap pekerja, termasuk upah serta kemampuannya merajut seluruh potensi persaudaraan dalam organisasi perusahaan. Konsep yang menghargai sesama dan persaudaraan ternyata telah banyak membantu etos kerja para pekerja di perusahaan besar.

a. Majikan/Perusahaan/Mu'jir

Pihak yang mempekerjakan (majikan/perusahaan) harus melakukan pemberian upah standar kepada pekerja/buruh dan menambahkan upahnya seiring dengan pertambahan usia dan perkembangan pengalamannya. Semua itu termasuk perbuatan yang baik. Adapun menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka hal ini bisa dilakukan melalui fasilitas yang lain, yaitu dari nafkah keraabatnya yang mampu, dari uang zakat dan sumber-sumber devisa negara yang lain seperti fai', ghanimah, kharaj dan lainnya.⁵⁸

b. Pemerintah/Ulil

Amri Syekh Yusuf Qardhawi memperbolehkan campur tangan pemerintah dalam pengupahan. Menurutnya tanggung jawab pemerintah sebagai ulil amri tidak sebatas menjaga keamanan negara saja. Syekh Yusuf Qardhawi beralasan campur tangan pemerintah dalam hal ini untuk memastikan keadilan. Terwujudnya keadilan antara pemerintah dan rakyat, pengusaha dan pekerja adalah dengan memastikan salah satu diantaranya tidak berbuat curang kepada yang lain. Pengaturan ini juga termasuk kewajiban dari seorang pemimpin. Allah SWT berfirman:

⁵⁸ Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), 42-43

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ
مَا يُنْفِقُ قُرْبَتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۚ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ
لَّهُمْ ۖ سَيَدْخُلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila menegakkan hukum di antara manusia supaya menetapkan dengan adil." Q.S. An-Nisa (4): 841.⁵⁹

Selain itu maksud diperbolehkannya campur tangan penguasa dalam penetapan upah pekerja adalah untuk mencegah kemudharatan. Dharar atau bahaya sendiri diklasifikasikan menjadi beberapa kaidah ilmu fikih. Diantaranya dharar harus dihilangkan.

Dharar tidak boleh dihilangkan dengan cara menimbulkan dharar yang lain. Artinya, semua undang-undang dan peraturan pemerintah yang bermaksud untuk mencegah dharar diperbolehkan. Pengaturan upah dimaksudkan agar tidak terjadi benturan antar kelompok masyarakat karena terjadi kesenjangan dan ketidakadilan.

Apabila pihak Negara yang mempekerjakan, maka seharusnya menjadi teladan bagi orang-orang lain dalam memenuhi gaji para pihak pegawainya dengan cara yang baik. Kewajiban negara adalah memenuhi kebutuhan secara penuh setiap orang yang hidup dalam pengayomannya baik seorang muslim maupun non muslim. Pertama, dari upah kerjanya, seraya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan kemanusiaannya, selama pendapatan negara mencukupi. Kedua, setelah pemenuhan kebutuhan bagi

⁵⁹ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), 41.

semua pekerja negara direalisasikan, diberikan peluang (hak) kepada negara untuk membedakan orang-orang yang giat dan kreatif dari orang-orang yang malas dan awam.⁶⁰

Tingkat upah ini berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja, adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu misalnya setahun, sebulan, seminggu atau sehari bahkan perjam, disebabkan tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga seseorang dengan takaran yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja itu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut, dan adanya pembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak perubahan manfaat yang diterima setelah periode kontrak berakhir, sehingga jika upah sudah tidak sesuai lagi maka upah yang baru dapat disepakati lagi.⁶¹

5. Standar Pengupahan dalam Islam

Dalam pengupahan yang ada diseluruh penjuru dunia masing-masing memiliki standar pengupahan yang berbeda-beda. Dalam kajian pemikiran ekonomi Islam klasik, pegawai secara umum diklasifikasikan menjadi dua; pegawai pemerintah yang mengurus urusan publik serta pegawai non pemerintah. Untuk pegawai pemerintah, mayoritas ilmuwan berpendapat bahwa pemerintah harus memperhatikan tingkat kecukupan hidup pegawainya, dalam arti standar penetapan upah tidak boleh hanya berdasar manfaat al-juhd semata. Dalam hal ini, mereka mendasarkan pendapatnya pada beberapa riwayat nabi dan sahabat yang menyebutkan bahwa mereka memberikan gaji kepada pegawai publik

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), Hlm. 409

⁶¹ Masyhuri (Ed), *Teori Ekonomi Dalam Islam*, (Jakarta: Danie Press, 2004), 195-196.

dan pemerintah, selain berdasar manfaat kerja juga berdasar kecukupan pekerja yang berupa kebutuhan pokok, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan lainnya.⁶²

Al-Mawardi, ahli politik Islam klasik, dalam bukunya *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah* menyebutkan dasar-dasar penetapan gaji bagi tentara yang berdasar pemenuhan kebutuhan pokok. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa standar dalam penentuan pemberian gaji adalah kecukupan (*al-kifāyah*) sehingga tidak perlu bekerja dan mencari sumber penghasilan lain yang bisa mengganggu tugas mereka dalam melindungi dan menjaga keamanan negara. Batas kecukupan tersebut memperhatikan tiga hal; pertama memperhatikan jumlah keluarga yang dinafkahinya; kedua, jumlah persenjataan dan kudanya; ketiga, memperhatikan harga barang di mana tentara tersebut ditempatkan.⁶³

Begitu juga Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmū'* mengatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas mengurus perkara yang keberadaannya merupakan kemaslahatan kaum muslimin, dan jika orang tersebut sibuk mencari nafkah tugasnya terbengkalai, maka ia berhak mendapatkan kecukupan atas kebutuhannya dari Baitul Mal. Termasuk dalam hal ini adalah semua ahli ilmu, pelajar, pekerja, juru tulis, akuntan dan semua yang dibutuhkan.⁶⁴ Begitulah, para ulama klasik berpendapat bahwa pemerintah wajib memberi gaji kepada para pegawainya, orang-orang yang bekerja di ruang publik dan orang-orang yang tenaganya dibutuhkan oleh masyarakat. Gaji tersebut dengan ukuran yang mencukupi diri dan keluarganya. Sedang mengenai pegawai non-

⁶² 47ahmad Syakur, *Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir)*, Diakses dari Www.Academia.Edu Pada 6 Maret 2021.

⁶³ Oal-Māwardi, *Al-Aḥkām Al-Sulṭānīyah* (Beirut: Dār Al-Fikr, 1960),205.

⁶⁴ Sharaf Al-Dīn Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, Vol 9, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1995),331.

pemerintah (swasta), para ulama klasik tidak secara eksplisit menegaskan ketentuan ini. Riwayat yang menyatakan kewajiban memberi upah sesuai kebutuhan pekerja di atas berlaku pada para pekerja negara yang bekerja di ruang publik dan pemerintahan. Namun banyak ulama⁶⁵ yang cenderung untuk menjadikannya sebagai standar umum upah setiap pekerja yang bekerja kepada majikannya secara penuh, baik pekerja negara maupun swasta.

Wahbah Al-Zuhaili, ahli hukum Islam kontemporer, mengatakan bahwa sesungguhnya hubungan antara majikan dan pekerja dalam Islam berdiri atas dasa kemanusiaan, kasih sayang, kerjasama, keadilan atau kecukupan, kerelaan dan kebiasaan.⁶⁶ Afzalur Rahman mengatakan bahwa pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah, karena itu Islam memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan. Sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang layak.⁶⁷ Berdasarkan hal itu, Afzalur Rahman mengatakan bahwa tingkat upah yang patut akan berada pada kisaran batas minimum pemenuhan kebutuhan pokok untuk melindungi hak-hak pekerja dan tidak melebihi batas maksimum untuk melindungi hak-hak majikan. Upah yang patut akan berubah di antara dua batas tersebut berdasarkan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari kelompok

⁶⁵ Ahmad Jalaludin, *Al-Siyāsah Al-Iqtisādiyyah Fī Daw' Al-Maṣlaḥah Al-Shar'īyah* (Malang, Uin Malang Press, 2008).418.

⁶⁶ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*. Vol. 7 (Beirut: Dar Al-Fikr Almu'asir, 1997), 5030.

⁶⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, 366.

pekerja, efektivitas organisasi pekerja dan sikap kemanusiaan majikan sebagai perwujudan kepercayaan pada Allah SWT dan hari pembalasan.

Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwān al-Muslimīn, memandang bahwa upah yang diterima oleh kaum buruh harus mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Pengupahan kaum buruh di bawah standar kebutuhan pokok menyebabkan kemiskinan yang terlarang dalam Islam. Ketika salah seorang direktur perusahaan mengatakan kepadanya: "Apakah engkau ridha melihat kondisi para buruh yang miskin itu?", Al-Banna menjawab: "Apakah kamu tidak tahu bahwa sebab dari kemiskinan tersebut adalah pelitnya perusahaan dan keengganannya untuk memberi upah yang sepadan dengan kebutuhan pokok hidup mereka".⁶⁸

Begitu juga Sayyid Qutb menyatakan bahwa Islam mensucikan hak pekerja dalam menerima upah. Penghormatan Islam ini tertuang dalam aturannya, yaitu pertama, Islam menyerukan para pengusaha/majikan untuk membayar upah yang sepatutnya (layak) dan mengancam serta memusuhi pengusaha yang bertindak dza lim dan menyimpang dari aturan ini. Yang kedua, Islam menyerukan untuk membayar upah pekerja dengan segera. Dalam hal ini, Islam mempertimbangan kebutuhan material dan kebutuhan psikologis dari pekerja/buruh. Kebutuhan psikologisnya adalah kebutuhan untuk diperhatikan, dihargai serta dianggap penting. Penyelesaian pembayaran upah adalah pemenuhan kebutuhan ini. Buruh akan merasa jerih payahnya dihargai dan kedudukannya dalam masyarakat diperhitungkan. Sedangkan pemenuhan kebutuhan materialnya dimaksudkan dengan pembayaran upah yang layak.⁶⁹

⁶⁸ Hasan Al-Banna, Majmū'at Al-Rasā'il (Kairo: Dār Al-Tawzī' Wa Al-Nashr Al-Islāmiyah, 1992), 352.

⁶⁹ Sayyid Qutb, Al-Adālah Al-Ijtima'iyah Fī Al-Islām (Kairo: Dār Al-Shurūq, 1995), 106-107.

Sedangkan Yusuf Qardawi menyatakan bahwa standar penetapan upah harus memperhatikan dua hal: Pertama: nilai kerja itu sendiri, karena tidak mungkin disamakan antara orang yang pandai dengan orang yang bodoh, orang yang tekun dengan orang yang malas dan lain sebagainya, karena menyamakan antara orang yang berbeda adalah suatu kezaliman. Kedua: kebutuhan pekerja, karena adanya kebutuhan pokok manusia yang harus di penuhi, baik berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, pengobatan, pendidikan anak, maupun segala sesuatu yang di perlukan sesuai dengan kondisi, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kekikiran untuk pribadi orang tersebut, dan untuk orang yang menjadi tanggungannya. Menurut Qardawi, taraf hidup layak ini bersifat selamanya dan tidak terbatas pada terpenuhinya kehidupan individu dalam batas atau tingkat darurat saja.⁷⁰

B. Hadhanah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hadhanah

a. Pengertian Hadhanah

Hadhanah menurut Mahmud Yunus dalam Kamus Arab Indonesia —”*hadhana yahdunu hadnan*”, yang berarti mengasuh anak, memeluk anak.⁷¹ Selain itu juga bermakna mendekap, memeluk, mengasuh dan merawat. Secara etimologis hadhanah adalah *al janbu* yang berarti erat atau dekat sebab *ḥaḍānah* pada hakikatnya yaitu usaha menghimpun anak-anak yang masih kecil agar menjadi dekat dan erat.⁷² Adapun secara terminologis adalah memelihara anak-anak yang masih kecil baik

⁷⁰ Yusuf Al-Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam. Terj. Didin Hafi Dudin, Dkk (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 406.

⁷¹ Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 105.

⁷² Ahmad Warson, Kamus-Arab Indonesia Al Munawwir, (Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), 295.

laki-laki maupun perempuan, atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sendiri dengan kadar kemampuannya.⁷³

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata maun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Adapun yang dimaksud dengan *kafalah* dan *hadhanah* adalah pemeliharaan dan pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap ialah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian.⁷⁴

Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan. Dalam *hadhanah* mengandung pengertian pemeliharaan secara jasmani dan rohani, disamping dari pemeliharaan jasmani dan rohani disamping itu juga terkandung pengertian mendidik anak. Pendidikan mungkin terdiri dari keluarga anak dan ia merupakan pekerja yang profesional. Sedangkan *hadhanah* dilakukan dan dilaksanakan oleh ibu si anak, kecuali bila anak tidak memiliki keluarga yang lain. *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik. Para ulama fiqh mendefinisikan *ḥadānah*, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayiz*, menyediakan sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalunya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁷⁵

Pemeliharaan (*Al-Nafaqah*) adalah hak istri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan tempat tinggal, beberapa layanan penting lainnya,

⁷³ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 224.

⁷⁴ Sabri Samin Narmayana Areong, *Fikih Ii*, (Makasar: Alauddin Pres, 2010), 161.

⁷⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat Ii*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171.

dan obat-obatan. Bahkan jika istri kebetulan adalah seorang wanita kaya pemeliharaan dalam bentuk ini adalah wajib menurut al-quran, sunnah dan konsensus pendapat para ahli hukum. Dimana kedua pasangan berada diatas usia pubertas, itu adalah tugas suami, dan bukan tanggung jawab seperti yang terjadi di beberapa negara barat saat ini, untuk menyediakan makanan ,pakaian dan penginapan kepada istrinya dan anak-anak dengan skala yang sepadan dengan keadaan sosial.⁷⁶

Menurut Wahbah Al-Zuhaili, ḥaḍānah merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam ḥaḍānah, maka yang diutamakan adalah hak anak.⁷⁷ Dalam meniti kehidupannya di dunia seorang anak memiliki hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Orang tua tidak boleh begitu saja mengabaikan lantaran hak-hak anak tersebut termasuk kedalam salah satu kewajiban orang tua terhadap anak ang telah digariskan dalam Islam, yakni al- ḥaḍānah, memelihara anak sebagai amanah Allah yang harus dilaksanakan dengan baik.⁷⁸ Kewajiban orang tua merupakan hak anak. Menurut Abdul Rozak, anak mempunyai hak-hak sebagai berikut :⁷⁹

1. Hak anak sebelum dan sesudah melahirkan.
2. Hak anak dalam kesucian keturunanya.
3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan.
5. Hak anak dalam mendapatkan hak asuan, perawatan dan pemeliharaan.

⁷⁶ Imam Ibnu Hajr, *Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, (Jakarta: Katulistiwa Press,2014),204.

⁷⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII*,(Damaskus: Daar Al Fikr, 1984), 279

⁷⁸ Abdur Rozak Kusein, *Hak Anak Dalam Islam*,(Jakarta: Fikahati Aneska, 1995), 49.

⁷⁹ Neng Djubaedah, Dkk, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*,(Jakarta, Pt. Hecca Utama,2005), 177.

6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.
7. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil baik secara mental, fisik, jasmani dan juga pengajaran. Hal ini dilakukan untuk membantu anak dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari dan juga untuk membentuk karakter anak agar menjadi anak yang bertanggung jawab.

b. Dasar Hukum Hadhanah

Adapun dasar hukum dari hadhanah yaitu:

1. Al-qur'an

Islam telah mewajibkan pemeliharaan atas anak sampai anak tersebut telamampu berdiri dengan sendirinya tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Oleh karena itu mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang masih di bawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya. Para ulama sepakat bahwa pemeliharaan anak itu adalah wajib, sebagaimana wajib memelihara selama dalam pernikahan, adapun dasar hukum dari hadanah atau pengasuhan anak adalah surah At-Tahrim (066): (6) :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُودًا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya, "hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."⁸⁰

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai manusia kita harus saling menjaga dan memelihara sesama anggota keluarga agar terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya berasal dari manusia itu sendiri. anak termasuk dalam anggota keluarga yang artinya anak harus dijaga, dilindungi, dipelihara dan diberi pendidikan, yang berkewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut bukanlah hanya orang tuanya saja (ayah dan ibunya) melainkan seluruh kerabat anak tersebut.

Secara khusus Alquran sangat memperhatikan pemeliharaan anak-anak yang belum mumayiz, hal ini sesuai dengan firman Allah Qs. Al-Baqarah (002) : (233).

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

⁸⁰ Departemen Agama Ri., Al-Qur"An Dan Terjemahnya, (Bandung:Diponegoro,2008), 560.

بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ، بَوْلِدِهِ^ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^{هـ}
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا^{هـ} وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ^{هـ} وَأَتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٧﴾

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma‘ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁸¹

Berdasarkan ayat diatas, Allah memerintahkan kepada orang tua agar memelihara anak-anak mereka yang belum mumayiz. Memerintahkan ibu agar menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Sedangkan ayah berkewajiban menanggung nafkah bagi

⁸¹ Ibid.47

keduanya dengan cara yang baik. Dan membolehkan mengambil wanita lain untuk menyusukan anak-anak mereka, dengan catatan memberikan pembayaran kepadanya dengan cara yang patut. Lebih lanjut, dalam ayat tersebut Allah mengisyaratkan, agar ibu dan ayah tidak menderita karena anaknya. Hal ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya. Apabila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga yang mampu.⁸²

Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa, Al-Quran menunjukkan beberapa perintah mengenai permasalahan menyusui dengan berbagai hak yang dimiliki oleh ibu, anak, dan ayah berkaitan dengan permasalahan ini. Secara keseluruhan, perintah-perintah itu terdiri dari tujuh aturan.

Tujuh petunjuk yang berkaitan dengan menyusui:⁸³

1. Hak menyusui anak selama dua tahun dikhususkan bagi ibunya karena dialah yang dapat menyusui dan menjaga bayinya anaknya selama masa ini. Berdasarkan fakta bahwa nutrisi bayi-baik jasmani maupun ruhaninya- memiliki hubungan yang dekat dan kokoh dengan air susu dan kasih sayang ibunya, maka walaupun perwalian anak-anak kecil telah diserahkan kepadabapaknya, hak perlindungan dan perawatan dan penjagaan seorang anak tetap diberikan kepada ibunya. Disisi lain kasih sayang ibu harus diberikan juga karena sang ibu tak tahan melihat

⁸² Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2013), 190.

⁸³ Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir Nurul Quran (Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2006), 244-248.

teteknya kosong dari anaknya dan tetap diam dalam saat-saat yang sensitif tersebut. Maka dari itu, mengkhususkan hak susu dan perawatan seorang anak pada ibunya merupakan sejenis hak yang saling berkaitan dan bermanfaat bagi keadaan sang ibu juga bagi sang anak.

dan para ibu (yang ditalak) hendaklah menyususkan anak-anaknya selama dua tahun...

2. Lamanya menyusui tidak perlu dua tahun persis. Masa menyusui yang lamanya dua tahun adalah bagi orang yang melaksanakan secara sempurna... *baginya (ayah) yang ingin menyempurnakan masa penyusuan...* Akan tetapi, menyangkut posisi badan sang anak dan kesehatannya, maka sang ibu juga memiliki hak untuk menghentikan masa (menyusui) ini apabila ia berfikir tidak menimbulkan sesuatu yang buruk. Sebuah hadis dari ahlulbait as mengatakan bahwa genapnya masa menyusui adalah dua tahun (24 bulan), sedangkan masanya yang tidak lengkap adalah 21 bulan. Gagasan ini mungkin hasil dari penggabungan konsep dalam ayat ini dan ayat ke-15 dalam surah al-Ahqaf yang mengatakan,... *mengandungnya dan menyapihnya adalah tiga puluh tahun...* Dan, kita mengetahui bahwa lamanya hamil biasanya sembilan bulan. Maka dari itu, sisa waktunya, yang berjumlah sepuluh satu bulan, adalah waktu yang biasa dipakai untuk menyusui. Dan, juga berdasarkan fakta dalam surah Al-Ahqaf, permasalahan ini tidak disebutkan dalam bentuk wajib. Oleh karenanya, dengan mengingat kesehatan sang

bayi, maka para ibu dibenarkan mengakhiri bulan-bulan menyusuinya kurang dari 21 bulan juga.

3. Biaya ibu untuk membeli makanan dan pakaian selama masa persusuan, bahkan tatkala ia ditalak, berada pada tangan ayah sang bayi agar ibu tersebut dapat menyusui bayi tersebut dengan nyaman dan dengan hati yang damai. (diwajibkan) atas sang ayah memberi (makanan) dan baju mereka (para ibu yang menyusui) dengan cara yang makruf... Di tempat ini, kata Al-Quran almaulud lahu (yaitu orang yang karenanya bayi dilahirkan) yang dipakai sebagai pengganti kat “bapak”, menarik perhatian. Agaknya wahyu tersebut ditunjukkan untuk menggerakkan rasa kasih sayang sang bapak sedemikian rupa kearah pengerjaan tugas yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, apabila biaya-biaya sang ibu dan anak selama masa penyusuan adalah milik dia sendiri dan buah hatinya, dia bukan orang asing. Frase dengan cara yang makruf disini menunjukkan bahwa pakaian dan makanan sang ibu seharusnya diberikan sesuai dengan penggunaan dan kedudukannya. Kebakhilan dan tindakan melewati batas tidak dibenarkan dalam keadaan seperti ini. Kemudian untuk menghilangkan kesamaran, ayat Al-Quran tersebut menjelaskan lebih lanjut mengenai perkara ini: bahwa tugas seorang bapak sesuai dengan kapasitasnya, karena Allah tidak membebani individu manapun melebihi kemampuannya... *tak satupun jiwa dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...*

4. Ayah dan ibu seorang anak seyogianya tidak mengabaikan nasib anak mereka karena perselisihan mereka sendiri. hal ini dapat membahayakan pikiran dan ruhani sang anak yang tak ada gantinya nanti. *...janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya,...*Laki-laki yang seyogianya memperhatikan hak menyusui dan perlindungan sang ibu. Mereka seharusnya tidak menginjak-injaknya dengan cara menyingkirkan anak tersebut dari mereka. Ibu-ibu pun seharusnya tidak menyalahgunakan hak yang diberikan kepada mereka, baik dengan tidak menyusunya dengan berbagai dalih yang sia-sia ataupun menghalangi sang bapak dari mengunjungi anaknya.
5. Setelah kematian sang bapak, maka sang ahli waris seharusnya melaksanakan tugas ini dan memenuhi keperluan sang ibu selama masa menyusui. *...dan warispun berkewajiban demikian...*
6. Izin menyapih diberikan kepada orang tua walaupun ayat sebelumnya elah meneptapkan beberapa batasan dalam menyusui sang anak. kedua orang tua, dengan persetujuan satu sama lain, dapat menyapih kapan saja apabila cocok dengan keadaan fisik sang anak. *....apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan , maka tidak ada dosa atas keduanya...* Yaitu, apabila apabila kedua orang tua telah berembuk dan sepakat untuk menyapih maka tidak akan ada masalah bagi mereka.

Sementara itu, sang ibu tidak diharuskan menyusui sang bayi. Karena itu kapan saja ia ingin memberhentikan maka ia dapat melakukannya, sebaiknya dia tidak melupakan beberapa dari kehendaknya sendiri demi perkembangan anaknya dan tidak melepaskan kerjasama serta konsultasi yang layak dengan suaminya sepanjang masa ini, sehingga izin bersama, yang ditunjukkan dalam ayat tersebut, terjadi secara aktual.

7. Tidak mungkin mencegah ibu dari menyusui anaknya kecuali ibunya tidak mau menyusui anaknya, atau benar-benar ada penghalang baginya. Sebagaimana dikatakan dalam al-Quran, ... *dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, makatidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran atas apa yang kamu janjikan menurut makruf...* Bagian terakhir dari ayat diatas menganfung akna bahwa melibatkan wanita lain untuk menyusui anaknya, setelah berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan bersama, tidaklah masalah. Tentu saja, asal tidak menginjak-injak hak ibunya berkaitan dengan lamanyamasa menyusui. Hak ini harus dibayarkan padanya dengan cara makruf.

Karena perselisihan dan pertentangan suami dan istri terkadang membangkitkan dendam antaramereka, dan nasib mereka dan nasib anak yang tak berdaya akan terancam bahaya, dan masing-masing dari mereka merencanakan hal buruk bagi yang lain, maka pada penghujung ayat al-Quran berkata,

...bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan...

2. Hadist

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib dari ayahnya:

حَدَّثَنِي عَمْرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ
امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ يَطْبِئُ لِي وَعَاءً
وَيُدْبِي لِي سِقَاءً وَحِجْرِي لِي حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَدَ أَنْ يَنْتَزِعَ
عَنِّي مَنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي (رواه
احمد وابو داود والبيهقي والحكم و صححه)

Artinya: “Dari hadist yang diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bahwa seorang perempuan berkata kepada Rasulullah Saw, Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini telah menjadikan perutku sebagai tempat (Naungan)-Nya, air susuku menjadi minumannya, dan pangkuanku sebagai tempat berteduhanya. Sedangkan ayahnya telah mentalakku seraya menginginkan untuk mengambilnya dariku. Maka Rasulullah Saw bersabda, Kamu lebih berhak terhadapnya selama belum menikah.”⁸⁴

Hadis ini menjelaskan bahwa ibu lebih berhak dari pada bapak selama ibunya belum menikah lagi. Ibu lebih diutamakan kelayakan mengasuh dan menyusui, mengingat ibu lebih mengerti dan mampu mendidik anak. Kesabaran ibu dalam hal ini lebih besar daripada bapak. Waktu yang dimiliki ibu lebih lapang dari pada bapak Karena itu, ibu lebih diutamakan demi

⁸⁴ Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'Ats As-Sajastani, Sunan Abu Daud Juz 1, (Beirut, Daar Fikr, 2003), 525

menjaga kemaslahatan anak. Jika si ibu telah menikah dengan laki-laki lain, maka hak hadanah menjadi hilang.⁸⁵

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak disebutkan pada Bab XIV Pasal 98, Pasal 105 dan Pasal 156 yang dijelaskan sebagai berikut; batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun, selama dalam pengasuhan orang tua segala perbuatan hukum anak di wakikan oleh orang tuanya, hak hadanah anak yang belum mencapai umur 12 tahun adalah hak ibunya, hak hadanah anak yang sudah mencapai umur 12 tahun diberikan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya, pemegang hak hadanah yang tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak hak hadanahnya dapat dicabut dan dilimpahkan kepada kerabat yang lain, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan kewajiban ayahnya apabila dalam kenyataanya ayah tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan Agama dapat menentukan ibu untuk ikut menanggung biaya tersebut.⁸⁶

2. Syarat-Syarat Hadhanah

Tidak semua orang diberikan hak untuk mengasuh anak atau *hadhanah* ada beberapa ketentuan yang menjadi syarat *hadhanah* tersebut. Mengingat begitu pentingnya hadanah maka ditetapkanlah beberapa syarat bagi seorang pemegang hak hadanah. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadanah. Adapun syarat-syarat hadanah tersebut antara lain adalah :

⁸⁵ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2, (Beirut: Darul Kutub Al Arabiyah, 1971), 528.

⁸⁶ Kompilasi Hukum Islam.

a. Berakal sehat.

Jadi, bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani hadanah karena mereka ini tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sebab orang yang tidak mempunyai apa-apa tentu tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain. Ulama Maliki mensyaratkan seorang ḥāḍ in haruslah cerdas. Seorang ḥāḍ in tidak boleh bodoh dan boros. Tujuannya agar harta milik anak yang dipelihara tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Ulama Maliki dan Hanafi mensyaratkan seorang ḥāḍ in tidak mengidap penyakit yang membuatnya dijauhi orang, seperti penyakit kusta atau lepra, dan sejenisnya yang membuat orang lain menjauhinya.

b. Dewasa.

Pada dasarnya anak kecil itu masih membutuhkan seseorang untuk mengurus urusannya dan mengasuhnya. Oleh karena itu orang yang sudah dewasa lah yang mampu untuk melakukan tugas tersebut.

c. Mampu mendidik.

Bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus kepentingan anak kecil. Karena ia tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak dan hal itu hanya akan menimbulkan kerugian bagi anak kecil yang diasuhnya.

d. Amanah dan berbudi.

Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan ia tidak dapat dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik.

Terlebih lagi, dikhawatirkan nantinya si anak akan meniru atau berkelakuan curang seperti orang yang mengasuhnya.

e. Islam.

Bagi anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Hal ini karena *hadanah* merupakan masalah perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin dibawah perwalian orang kafir. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Qs. An-Nisa (004): (141).

f. Ibunya belum menikah lagi.

Bagi ibu yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain maka hak *hadanahnya* hilang. Hal ini di khawatirkan lakilaki tersebut tidak bisa mengasihi si anak dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan baik. Namun apabila ibu menikah lagi dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya, maka hak *hadānah*nya tidak hilang. Hal ini karena paman itu masih berhak dalam masalah *hadānah*. Selain itu karena hubungan dan kekerabatannya yang dekat dengan anak kecil tersebut, ia akan dapat bersikap mengasihi serta memperhatikan haknya.

g. Merdeka.

Sehingga bagi seorang budak tidak diperbolehkan mengasuh anak kecil, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusanurusan tuannya sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk mengasuh anak kecil.⁸⁷

⁸⁷ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah Jilid 2,(Beirut: Darul Kutub Al Arabiyah,1971),219-221

Para ahli fiqih mendasarkan kesimpulan tersebut pada ayat 6 surah AtTahrim yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud bilamana yang mendampingi atau yang mengasuhnya bukan seorang muslim.

Adapun syarat anak yang akan diasuh (madhun) itu adalah:

- a. Masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
- b. Berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot masih tetap harus mendapatkan hadhanah. orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akal nya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.⁸⁸

Adapun syarat-syarat umum untuk pengasuhan wanita dan pria :⁸⁹

- a. Baligh (dewasa)
- b. Berakal, ulama mazhab maliki menambahkannya dengan cerdas, dan ulama mazhab hambali menambahkan bahwa pengasuh tidak menderita penyakit yang berbahaya/menular.
- c. Memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak.
- d. Dapat dipercaya memegang amanah dan berakhlak baik.
- e. Beragama islam.

⁸⁸ Sabri Samin dan Narmayana Aroeng, Fikih Ii (Makassar: Alauddin Press, 2010),162
163

⁸⁹ Satria Efendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyyah,(Jakarta: Kencana,2004), 171.

Menurut para ahli fikih syarat khusus untuk pengasuh wanita adalah sebagai berikut:

- a. Wanita pengasuh tidak mempunyai suami setelah dicerai suaminya.
- b. Wanita pengasuh merupakan mahram (haram dinikahi) anak, seperti ibu, saudara perempuan ibu dan nenek. Oleh karena itu, menurut Ulama Fikih, saudara perempuan ibu tidak boleh menjadi pengasuh anak itu, karena bukan mahramnya.
- c. Menurut ulama Madzab Maliki, pengasuh tidak boleh pengasuh anak tersebut dengan sikap yang tidak baik, seperti marah dan membenci anak itu.
- d. Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali menambahkan syarat, apabila anak asuh masih dalam usia penyusu pada pengasuhnya, tetapi ternyata air susu pengasuhnya tidak ada atau ia enggan untuk menyusukan anak itu maka ia tidak berhak menjadi pengasuh.⁹⁰

Syarat-syarat khusus bagi laki-laki Jika anak kecil tersebut tidak memiliki pengasuh wanita, maka pengasuhnya dapat dilakukan oleh kaum pria, selagi ia memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jika pengasuhnya adalah mahram (haram dinikahi) Para fuqaha membolehkan untuk melakukan ḥaḍānah bagi wanita oleh pria yang muhrim baginya, baik anak tersebut masih kecil, disenangi atau tidak disenangi pengasuh laki-laki, ketika tidak ada wanita yang berhak melakukan hadanah baginya.
- b. Pengasuh yang bukan mahram (boleh dinikahi) Jika ada orang yang bukan muhrim bagi anak, maka itu diperbolehkan dengan syarat pengasuh tersebut

⁹⁰ Andi Syamsu Alam dan H. M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 124.

memenuhi kriteria hadanah, yakni adanya wanita yang ikut membantu laki-laki tersebut dalam mengasuh anak.⁹¹

3. Orang yang Berhak atas Hak Asuh Anak

Adapun dasar urutan orang yang berhak untuk memberikan pengasuhan terhadap anak, yaitu:

- a. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatnya dalam kerabat adalah sama.
- b. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding saudara perempuan.
- c. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
- d. Dasar urutan ini ialah kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
- e. Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada maka hak hadhanah pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.

Sebagai orang tua memberikan pengasuhan terhadap anak adalah suatu keharusan yang diwajibkan, sehingga bagi semua orang tua yang diberikan amanah dipundaknya untuk memberikan pengasuhan terhadap anak diharuskan memberikan pendidikan dan perlindungan yang ekstra, agar anak tetap mendapatkan hak atas dirinya. Ada dua periode mengenai masa hadanah seorang anak, yaitu :

1) Periode sebelum Mumayiz

Periode ini adalah dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa tersebut umumnya seorang anak belum masuk kategori mumayiz atau belum bisa membedakan

⁹¹ Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Anak-Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi, 2004), 134.

antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini, setelah memenuhi syarat-syarat sebagai pemegang hak hadanah, kesimpulan ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak mengasuh anak tersebut. Terlepas dari ibu yang paling berhak atas hadanah anak yang belum mumayiz jika ibu tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemegang hak hadanah, maka orang yang berhak menjadi ḥāḍin adalah ibu dari ibu yaitu nenek seterusnya keatas. Kemudian ibu dari bapak yaitu nenek seterusnya keatas.

Kemudian saudara ibu yang perempuan sekandung, anak perempuan dari saudara perempuan seibu dan anak perempuan dari perempuan seayah. Kemudian anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seayah. Kemudian, bibi dari ibu yang sekandung dengan ibunya, bibi dari ibu yang seayah dengan ibunya. Kemudian, bibi dari bapak yang sekandung dengan ibunya, bibi dari bapak yang seibu dengan ibunya, dan bibi dari bapak yang seayah dengan ibunya. Demikianlah seterusnya. Dan selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.⁹²

2) Periode Mumayiz

Masa mumayiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu, ia sudah

⁹² Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2009), 487.

dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia akan ikut ibu atau ayahnya.

Masalah periode hadanah bagi seorang anak selain diatur dalam Alquran dan Hadis, permasalahan tersebut juga diatur didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 156 sebagai berikut; Pasal 105 menjelaskan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya. Sedangkan Pasal 156 menjelaskan, anak yang mumayiz berhak memilih mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya. Meskipun anak itu dalam pengasuhan ibunya, maka ia tidak berhak melarang bapaknya untuk mengunjunginya dan membawanya ke kantor atau tempat lainnya. Dan setelah itu ia dikembalikan lagi kepada ibunya. Dan sebaliknya jika anak itu berada dibawah pengasuhan bapak, maka ia tidak berhak menghalangi anaknya itu untuk mengunjungi ibunya atau menghalangi ibunya mengunjungi anaknya tersebut.⁹³

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur bagi laki-laki dan perempuan adalah :

Ulama Hanafi berpendapat bahwa masa asuhan adalah tujuh tahun untuk lakilaki dan sembilan tahun untuk wanita. Hadanah anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sehari-hari seperti makan, minum dan sebagainya. Sedang masa hadanah wanita. berakhir apabila ia telah baligh atau telah datang masa haidl pertamanya.⁹⁴

Kemudian menurut Ulama Syafi'i mengatakan tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa

⁹³ Syaikh Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga- Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at, Terjemahan Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 457

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..214.

menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Kalau si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu ataukah dengan ayahnya. Kalau seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang harinya, agar si ayah bisa mendidiknya. Sedangkan bila anak itu perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi bila si anak memilih tinggal bersama ibu dan ayahnya, makadilakukan undian, bila si anak diam tidak memberikan pilihan dia ikut bersama ibunya.

Menurut mazhab maliki masa asuh anak laki-laki adalah sejak di lahirkan hingga baligh. Sedangkan anak perempuan hingga menikah. Menurut Hambali masa asuh anak laki-laki dan perempuan adalah tujuh tahun dan sesudah itu si anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu si anak tinggal bersama orang yang dipilihnya itu.⁹⁵

C. Pengasuh Anak Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki

Imam Syafi'i tidak memperkenankan seorang kafir mengasuh anak-anak yang beragama Islam sedangkan mazhab lainnya tidak mensyaratkan hal yang demikian itu. Demikian juga para ahli hukum Islam di kalangan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa keluarnya seorang wanita atau laki-laki dari agama Islam dapat menggugurkan hak asuhan terhadap anak yang diasuhnya.⁹⁶

beragama Islam, ini adalah pendapat yang dianut oleh jumhur ulama, karena tugas memberikan pengasuhan itu

⁹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*417-418.

⁹⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-6 (Jakarta: Kencana, 2012), 426.

termasuk tugas untuk mendidik yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh oleh pengasuh tersebut.⁹⁷

Ulama Syafi'i mensyaratkan seorang pengasuh harus beragama Islam, dan Ulama Hanafi mensyaratkan bahwa seorang pengasuh bukanlah orang yang murtad, jika seorang pengasuh murtad maka gugurlah haknya untuk menjadi seorang pengasuh, sebab orang kafir karena murtad dapat dipenjara sampai ia bertaubat dan kembali dalam Islam atau mati dalam penjara, sehingga ia tidak boleh diberi kesempatan mengasuh anak kecil, kecuali jika ia telah bertaubat dan kembali ke Islam. Ulama Syafi'i berpendapat disyaratkan bagi pemegang hak *ḥadanah* dengan beberapa syarat... ketiga yaitu beragama Islam, maka tidak ada hak *ḥadanah* oleh orang kafir terhadap anak orang Islam.⁹⁸

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa, dalam asuhan seperti itu disyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh laki-laki.

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan Islam sebagai syarat bagi pengasuh atas anak Islam. Dalam Kitab "Raudlatut Tholibin Wa Umdatul Muftin" karya Yahya bin Syarf An-Nawawi disebutkan bahwa "maka tidak berhak hak asuh (*hadanah*) bagi orang kafir atas anak muslim." Ulama Malikiyah berpendapat jika dikhawatirkan kerusakan pada anak yang diasuh, hak asuh anak tidak lantas pindah bagi pemegang hak asuh yang Islam akan tetapi hak asuh itu tetap pada ibu yang murtad tadi selama dalam proses pengasuhannya berada dalam lingkungan Islam. Disebutkan juga dalam Kitab "Syarh Al-Kabir" juz I karya Abu Barakat

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munafakat Dan Undang-Undang*. (Jakarta: Kencana, 2007), 329.

⁹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba' Ah*, (Beirut: Darul Kutub Alilmiah, 2003), 522.

Ahmad Ad Dardir: “Harus tinggal (bersama orang muslim) jika dikhawatirkan kerusakan pada anak tersebut seperti makan daging babidan khamr, supaya orang-orang muslim tadi mengawasi orang yang mengasuh anak tersebut dan tidak boleh mengambil anak tersebut dari pengasuh dan tidak disyaratkan lingkungan mayoritas muslim, akan tetapi, satu orang muslim sudah cukup.”⁹⁹

Malikiyyah berpendapat bahwa anak tersebut tinggal bersamanya sampai masa hadanah selesai menurut syariat, namun wanita non-muslim yang memeliharanya tidak boleh menghadirkan minuman keras dan daging babi pada anak tersebut. Dan jika khawatir terjadi penyelewengan maka pihak keluarga boleh memberikan hak untuk mengawasi kepada sesama muslim agar menjaga anak tersebut.

Dari pengasuhan yang diberikan oleh pengasuh non-muslim tersebut timbulah kewajiban untuk memberikan timbal balik atas apa yang telah dikerjakan olehnya yaitu, berupa upah. Upah yang diberikan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh penerima jasa pengasuhan anak tersebut.

Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Hambali: wanita yang mengasuh berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya, baik dari berstatus ibu sendiri maupun orang lain bagi anak itu. Syafi'i menegaskan bahwa, manakala anak yang diasuh itu memiliki harta sendiri, maka upah tersebut diambilkan dari hartanya, sedang bila tidak, upah itu merupakan tanggung jawab ayahnya atau orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada si anak.

Sedangkan menurut pandangan imam maliki terkait pengupahan terhadap pengasuh anak adalah wanita pengasuh tidak berhak atas upah bagi pengasuhan yang diberikannya.

⁹⁹ Abu Barakat Ahmad Ad, *Syarh Al-Kabir*” Juz Iii, (Beirut: Dar Al Kutub Alalamiyah,1992),529.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, Dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid I, Cet. Xi, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdullah Mustofa Al-Maraghi, “*Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyin*”, Terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Cet. Ke-1, Yogyakarta : LPKSM, 2001.
- Abdur Rahman Al-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran Dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Terkemuka*, Bandung: Al-Bay, 1994.
- Abdur Rahman Al-Syarqawi, *Riwayat Imam Fiqh*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Abdur Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Abdur Rozak Kusein, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1995.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba’Ah*, Beirut: Darul Kutub Alilmiah, 2003.
- Abdurrahman Al-Jaziri. T.Th. *Al-Fiqh „Ala Madzahib Al-Arba’Ah*. Beirut: Dar Al-Qalam. Dikutip Oleh Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Abdurrahman L. Doi, *Inilah Syariat Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Abu Barakat Ahmad Ad, *Syarh Al-Kabir” Juz Iii*, Beirut: Dar Al Kutub Alalamiyah, 1992.
- Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy‘Ats As-Sajastani, *Sunan Abu Daud Juz 1*, Beirut, Daar Fikr, 2003.

- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jil Ii* ,Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa , 2002.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta : Dhana Bakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Al-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Imam Mazhab, (Hanafi , Maliki , Syafi' i dan Hambali)* , Jakarta: Bumi Aksara,1991.
- Ahmad Asy-Syurbasi, Al-Aimmah Al-Arba'ah, Futuhul Arifin, *Terjemahan 4 Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Ahmad Jalaludin, Al-Siyāsah Al-Iqtisādiyah Fī Ḍaw' Al-Maṣlahah Al-Shar'īyah , Malang, Uin Malang Press, 2008.
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2013.
- Ahmad Syakur, Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir), Diakses dari Www.Academia.Edu Pada 6 Maret 2021.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Warson, Kamus-Arab Indonesia Al Munawwir, Surabaya, Pustaka Progresif,1997.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, Surabaya, Indonesia: Ahmad Ibn Sya'Diah Cet. 1.
- Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran* , Jakarta: Penerbit Al-Huda, 2006.
- Al-Māwardi, Al-Ahkām Al-Sulṭānīyah , Beirut: Dār Al-Fikr, 1960.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munafakat Dan Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Andi Syamsu Alam dan H. M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.

Aqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Maghfirah Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Maghfirah Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2000.

Departemen Agama Ri., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008.

Dinasril Amir, "*Profil Imam Malik Sebagai Muhaddist Dan Fiqih Dalam Sejarah Pendidikan Islam Dan Ilmu Pendidikan Islam*". Jurnal At-Tafkir Vol. XII No. 1 Juni 2019, 8.

Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji dan Pedoman Menghitung Gaji*, Jakarta: Pranita Offset, 2008.

Eka Fitriani, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengasuh Anak Dari Istri Yang Murtad (Analisis Terhadap Imam Mazhab)*", skripsi, program sarjana hukum UIN Allauddin Makasar, 2019.

Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1984.

Hasan Al-Banna, *Majmū'at Al-Rasāil*, Kairo: Dār Al-Tawzī' Wa Al-Nashr Al-Islāmiyah, 1992.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Nusa Jaya, 2005.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Huzaemah T. Yanggo, *Fiqh Anak-Metode Islam Dalam Mengasuh Dan Mendidik Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*, Jakarta: Al-Mawardi, 2004.

- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Bandung : Al-Ma'arif, 2006.
- Imam Ibnu Hajr, *Bulugh Al-Maram Min Adilat Al-Ahkam*, Jakarta: Katulistiwa Press, 2014.
- M . Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Cet. Ke- 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- M .Bahri Ghazali Dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, Cet. Ke-1, Jakarta :Pedoman Ilmu, 1992.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995.
- M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah* , Jakarta: Logos, 1999.
- Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.
- Masyhuri (Ed), *Teori Ekonomi Dalam Islam* , Jakarta: Danie Press, 2004.
- Muchdarsyah Sinungan, *Produktifitas Apa Dan Bagaimana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Muhammad Ismail Yusanto Dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Muhammad Yasir Abdul Muthalib, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Juz I, Cet IV, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib, Alih Bahasa, A.M Basalamah*, Cet. Ke-1 , Jakarta : Gema Insani Press, , 1994.
- Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar-mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Neng Djubaedah, Dkk, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta, Pt. Hecca Utama, 2005.

Patmonoewo, *Pendidikan anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000 .

Pengertian “Non Muslim” (Online) tersedia di: [http://www.santricendikia.com/2012/04/sika-muslim-terhadap-non-muslim.diunduhpada tanggal \(11-08-2015 pukul 21.33 WIB\)](http://www.santricendikia.com/2012/04/sika-muslim-terhadap-non-muslim.diunduhpada tanggal (11-08-2015 pukul 21.33 WIB))

Purwodarminto, *Nilai-nilai karakter*, Jakarta: Balaipustaka, 1990.

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Rifa Atul Mahmudah, “*Analisis Fikih Empat Imam Mazhab Terhadap Pemberian Hak Hadhanah Kepada Ibu Murtad Karena Anak Masih dalam Masa Akhir Persusuan*”, (skripsi, program sarjana hukum fakultas syariah UIN sunan ampel surabaya, 2018).

Rustam Effendi, *Produksi dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.

Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003.

Sabil Had dan Ahmadi, *Sejarah dan Biografi Imam IV Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

Sabri Samin dan Narmayana Aroeng, *Fikih Ii* , Makassar: Alauddin Press, 2010.

Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari - Hari* , Jakarta: Gemainsani, 2006.

Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sayyid Qutb, Al-, *Adālah Al-Ijtimā’Iyah Fī Al-Islām* , Kairo: Dār Al-Shurūq, 1995.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: Alma'arif, 1988.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: Alma'arif 1987.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Terjemahan Kamaludin A. Marzuki, Cet. 2, Bandung: Al-Ma'Arif, 1988.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Beirut: Darul Kutub Al Arabiyah, 1971.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Penerjemah Nor Hasanudin*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.

Sharaf Al-Dīn Al-Nawawi, *Al-Majmu'*, Vol 9, Beirut: Dār Al-Fikr, 1995.

Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004.

Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat Ii*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga- Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Terjemahan Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2009.

Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*. Vol. 7, Beirut: Dar Al-Fikr Almu'Asir, 1997.

Wahbah Az - Zuhayli, *Al - Fiqh Al Islam Wa Adilatuhu* Abdul Hayyie Al Kattani, Jilid:V, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu* Juz Vii, Damaskus: Daar Al Fikr, 1984.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Rajawali Pers, 1994.

Yusuf Al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terj. Didin Hafi Dudin, Dkk, Jakarta: Rabbani Press, 2001.

Zulkarnaain Ibrahim, *Hakikat Hukum Pengupahan Dalam mewujudkan Kesejahteraan sosial*, 2010, Jurnal Ekonomi